



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AWAN NURMAWAN NUH**
2. Jabatan : **INSPEKTUR JENDERAL**
3. NHK : **124335**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.096.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.636.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.980.000.000
4. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.980.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.310.000.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA REBEL CMX500 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOBIL, FORD FOCUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI Z900 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. MOBIL, CHRYSLER JEEP CHEROKEE Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. MOBIL, SUZUKI GSVX 4X4 MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000



7. MOTOR, SUZUKI TS 125 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

8. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 1997, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.592.712.406

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 17.999.212.406

III. HUTANG Rp. 1.644.497.456

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 16.354.714.950

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.